

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN
EKONOMI, UKURAN LEGISLATIF, DAN KARAKTERISTIK KEPALA
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)



Oleh:

Nama: Iqbal Tigana Ridho

No. Mahasiswa: 16312312

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN
EKONOMI, UKURAN LEGISLATIF, DAN KARAKTERISTIK KEPALA
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Iqbal Tigana Ridho

No. Mahasiswa: 16312312

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Penulis,



(Iqbal Tigana Ridho)

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN
EKONOMI, UKURAN LEGISLATIF, DAN KARAKTERISTIK KEPALA
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Iqbal Tigana Ridho

No. Mahasiswa: 16312312

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 21 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, UKURAN
LEGISLATIF, DAN KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)**

Disusun Oleh : **IQBAL TIGANA RIDHO**
Nomor Mahasiswa : **16312312**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 05 Juli 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji : Fitriati Akmila, S.E., M.Com.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

*“Kemarin saya pintar, saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana,
jadi saya mengubah diri saya sendiri”*

- Jalaluddin Rumi -

المعهد الإسلامي
الاستاذ الأندلسي

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** guna memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Rusdan Ridho dan Ibu Sulasiah** kedua orang tua penulis yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, *support*, dan senantiasa berdoa untuk kebaikan penulis dalam situasi apapun. Semoga segala kebaikan mendapat balasan Allah SWT. Aamiin
3. **Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Bapak, atas semua ilmu yang diberikan.
4. **Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

5. **Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. **Aprilia Ratna Saputri** kakak penulis yang baik hati dan selalu memberikan *support* serta semangat kepada penulis.
7. **Apriska Eriza Ridho** kakak penulis yang bersama Kaka Dewi serta Qirani dan Adel selalu memberikan dukungan juga semangat kepada penulis.
8. **PH KOOR HMJA KOMISI 18/19** terima kasih Aufa, Afief, Aya, Fita, Nandira, Rosita, Devani, Venti, Ajeng, Cholish, Erha, dan Jaseim. Semoga sukses untuk kita semua, dan tercapai apa yang kita impikan aamiin.
9. **Teman-teman UPP** Ganis, Nindy, dan Sandy terima kasih bantuannya, *support*-nya, dan kerjasamanya. Sukses untuk kalian semua.
10. **HMJA KOMISI FBE UII** sangat bersyukur menjadi bagian keluarga HMJA KOMISI, terima kasih telah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan menjadi wadah untuk berkembang menjadi lebih baik.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Iqbal Tigana Ridho

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 LANDASAN TEORI	10
2.1.1 Teori Institusional.....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah	14
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.5 Ukuran Legislatif.....	17
2.1.6 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah.....	18
2.1.7 <i>Background</i> Pendidikan Kepala Daerah.....	19
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	20
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN.....	23

2.3.1	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.3.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.3.3	Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.3.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.3.5	Pengaruh Background Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.4	KERANGKA PENELITIAN	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	POPULASI DAN SAMPEL	31
3.1.1	Populasi	31
3.1.2	Sampel	31
3.2	SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA.....	32
3.2.1	Sumber Data	32
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	32
3.3	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	33
3.3.1	Variabel Dependen	33
3.3.2	Variabel Independen.....	34
3.4	METODE ANALISIS DATA.....	37
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	37
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	37
3.4.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	39
3.4.4	Analisis Koefisien Determinasi.....	39
3.4.5	Uji Parsial	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	41
4.2	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	44

4.3	UJI ASUMSI KLASIK	46
4.3.1	Uji Normalitas	47
4.3.2	Uji Multikolinearitas	49
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	50
4.4	ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	51
4.5	ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI.....	53
4.6	UJI PARSIAL	54
4.7	PEMBAHASAN	56
4.7.1	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	56
4.7.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	58
4.7.3	Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	59
4.7.4	Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	60
4.7.5	Pengaruh Background Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		63
5.1	KESIMPULAN	63
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN.....	65
5.3	SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Daftar Sampel	42
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.3 Statistik Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4.4 Statistik <i>Background</i> Pendidikan	46
Tabel 4.5 Uji Normalitas	47
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.9 Analisis Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.10 Uji Parsial	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	30
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	48
Gambar 4.2 P-P Plot Uji Normalitas.....	48
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Kabupaten/Kota.....	72
Lampiran 2: Data Penelitian.....	77
Lampiran 3: Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan dengan Rasio Efisiensi	82
Lampiran 4: Karakteristik Kepala daerah	87
Lampiran 5: Statistik Deskriptif.....	90
Lampiran 6: Uji Asumsi Klasik	91
Lampiran 7: Analisis Regresi.....	94

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of local government size, economic growth, size of legislative, and the characteristics of regional heads on the financial performance of local governments. The population of this study is all districts / cities in Indonesia, with a purposive sampling technique, the sample used is 130 districts / cities in 2018. The hypothesis is tested using multiple regression. The results of hypothesis testing show that the size of the regional government, the size of the legislature, and the level of education of the regional head have a positive effect on the financial performance of the regional government, while the economic growth and the educational background of the regional head have no effect on the financial performance of the regional government.

Keyword: *financial performance, size of local government, economic growth, size of legislative, characteristics of regional head*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan teknik *purposive sampling*, sampel yang digunakan sebanyak 130 kabupaten/kota tahun 2018. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemda, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, karakteristik kepala daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kebebasan yang suatu daerah punya untuk menciptakan peraturan daerah, menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Diterapkannya otonomi daerah juga merupakan bentuk dari desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengelola segala kepentingan daerahnya. Pemerintah daerah dengan kekuasaan yang dimiliki diharapkan membuat kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan secara demokratis, adil, merata serta berkesinambungan.

Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan semakin luasnya wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, juga dibarengi dengan semakin besarnya harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Maka dari itu, diperlukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting, karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Pengukuran kinerja memiliki fungsi untuk mengevaluasi program yang telah berjalan, sarana perbandingan atas layanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik (Saraswati, 2019). Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk

memastikan pemerintah daerah telah melaksanakan aturan keuangan dengan baik dan benar adalah dilihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah ketika berupaya untuk memberikan kinerja yang baik tidak hanya semata-mata karena memang itulah tugas dari pemerintah daerah, tetapi ada maksud lain yaitu untuk memperoleh legitimasi dan kekuasaan politik yang layak di daerahnya. Hal tersebut selaras dengan teori isomorfisma institusional, yang menyatakan bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi untuk kekuasaan legitimasi dan politik, serta kesesuaian sosial dan ekonomi (Sofyani & Akbar, 2015).

Ukuran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu pemerintah daerah memiliki ukuran yang besar, maka besar pula peluang pemerintah daerah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pengelolaan serta memanfaatkan sumber daya daerah. Dengan ukuran yang besar, pemerintah daerah juga lebih dituntut akan akuntabilitas sehingga hal tersebut akan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah dapat diprosikan sebagai total aset yang dimiliki daerah tersebut dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, dan pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan sumber - sumber

potensi daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga dipastikan akan meningkat (Mulyani & Wibowo, 2017).

Diterapkannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah menjadi lebih leluasa untuk membangun daerahnya, salah satu bentuknya adalah dengan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur yang oleh masyarakat dapat dirasakan langsung manfaatnya. Pembangunan sarana dan prasarana juga merupakan usaha pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ekonomi akan semakin tergerak dengan adanya sarana dan prasarana dalam bidang ekonomi yang dekat dengan aspek kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diketahui dari kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Kegiatan ekonomi dapat dikatakan mengalami peningkatan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif maka kegiatan ekonomi mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (*Gross Domestic Product*) juga dapat menjadi indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri (Nasution & Panggabean, 2017).

Salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, dengan sumber daya alam yang kaya dan didukung dengan peran teknologi yang tepat maka seharusnya akan lebih mudah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan sumber daya yang melimpah tentu menjadi berkah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, dan seharusnya pemerintah daerah dapat membuktikan dengan kinerja yang baik termasuk dalam hal keuangan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terlepas dari peran legislatif yang ada di daerah tersebut. Ukuran legislatif merupakan indikator penting dalam menjalankan pemerintahan. Ukuran legislatif dapat diukur dari seberapa banyak jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di suatu daerah, yang mana memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Semakin besar ukuran legislatif yang ada di pemerintah, maka seharusnya semakin besar pula dampak dari fungsi dan program kerja yang dimiliki oleh legislatif, hal itu tentu akan memacu pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja demi mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya.

Jumlah anggota DPRD yang semakin banyak, diharapkan tingkat pengawasan terhadap pemerintah daerah semakin tinggi sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggungjawab dan tingkat kemauan bekerja seseorang terhadap pekerjaannya (Novianti et al., 2016). Lembaga legislatif memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam hal penganggaran daerah. Lembaga legislatif harus mengawasi seberapa besar pemasukan yang akan diterima

dan pengeluaran yang akan dilakukan, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah daerah baik buruknya tidak bisa terlepas dari peran kepala daerah. Pengalaman direktur utama, nilai, dan kepribadian akan memengaruhi persepsi selektif, interpretasi, visi, pilihan strategi dan akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi mencerminkan karakter dari direktur utama (Mahardini, 2014).

Dalam menjalankan roda pemerintah daerah, karakteristik khusus perlu dimiliki oleh seorang kepala daerah agar perubahan daerah ke arah yang lebih baik dapat terjadi. Sebagai contoh, untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat kepala daerah harus memiliki kemampuan mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan semakin baik. Kemampuan kepala daerah dalam mengelola pemerintah daerah serta menyelesaikan segala masalah yang ada di daerah dapat dipengaruhi oleh karakteristik kepala daerah itu sendiri, seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan kepala daerah.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang hampir sama. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel baru serta penggunaan teori dasar yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teori Isomorfisme Institusional yang merupakan turunan dari teori Institusional. Isomorifisme Institusional memiliki tiga tipe yaitu Isomorfisme

Koersif, Isomorfisme Mimetik, dan Isomorfisme Normatif. Penelitian ini lebih menekankan pada Isomorfisme koersif dan Isomorfisme Normatif.

Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala Daerah yang terdiri dari Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah dapat menjadi tekanan sekaligus faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk terus bekerja maksimal dan menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam hal keuangan.

Penelitian yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Sari (2016), dan hasilnya adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan Martantri (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan pengaruh karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian dari Mahardini (2014) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
3. Apakah Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
4. Apakah Tingkat Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?
5. Apakah Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menggunakan teori dasar *Institutional Isomorphism* khususnya tekanan *coercive isomorphism* dan *normative isomorphism*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wadah bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi yang sudah didapatkan selama perkuliahan, khususnya akuntansi sektor publik. Memberikan pemahaman yang lebih mengenai pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

1.4.2 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan tambahan informasi bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi orang yang membacanya dan dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan *leverage*. Selain itu bab ini juga membahas hipotesis penelitian untuk setiap variabel serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai penentuan populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari hasil analisis data dalam penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Menurut Meyer dan Rowan dalam Wikke (2018) teori institusional (*Institutional Theory*) didasarkan pada suatu pemikiran yaitu, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung, hal tersebut perlu dilakukan agar organisasi terus bertahan hidup. Berdasarkan teori institusional, organisasi yang mengutamakan legitimasi akan lebih cenderung untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial di mana organisasi berada.

2.1.1.1 Isomorfisme Institusional

Isomorfisme menurut DiMaggio dan Powell (1983) adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Ada dua jenis Isomorfisme, yaitu: (1) Isomorfisme Kompetitif (*Competitive Isomorphism*), yakni asumsi rasionalitas sistem yang menekankan persaingan pasar, perubahan yang bagus, dan pengukuran kesesuaian; dan (2) Isomorfisme Institusional (*Institutional Isomorphism*) yaitu organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi untuk kekuasaan legitimasi politik dan institusional, untuk kesesuaian sosial serta ekonomi. Memahami politik dan tata cara kehidupan organisasi yang lebih modern merupakan guna dari konsep Isomorfisme Institusional (Sofyani & Akbar, 2015).

Terdapat tiga tipe isomorfisme untuk bagaimana organisasi dapat menyesuaikan diri, yaitu: (1) *coercive isomorphism*, yang muncul sebagai akibat dari pengaruh tekanan kekuatan politik guna memperoleh legitimasi bagi sebuah organisasi, (2) *mimetic isomorphism*, ketidakpastian yang hadir di lingkungan tempatnya beroperasi, sehingga mengharuskan organisasi untuk bereaksi, dan (3) *normative isomorphism*, yang diasosiasikan dengan proses homogenisasi organisasi melalui proses pendidikan dan asosiasi organisasi profesional (Akbar, 2012).

Coercive isomorphism dalam konteks organisasi pemerintah terlihat pada pemerintah daerah, yang sangat mungkin dalam penyusunan laporan kinerjanya bergantung kepada pemerintah pusat terutama terkait alokasi APBD, sehingga pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya demi mendapat pengakuan dan dianggap patuh dalam menjalankan roda pemerintahan. Kinerja pemerintah di setiap daerah tentu berbeda, pemerintah daerah yang merasa kinerjanya belum maksimal akan terpacu untuk meningkatkan kinerjanya dan akan mengambil pelajaran dari pemerintah daerah yang kinerjanya lebih baik, dalam konteks inilah *mimetic isomorphism* muncul. *Normative isomorphism* mulai terlihat dari upaya setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dengan pelatihan teknis maupun jalur akademik, yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. DiMaggio dan Powell (1983) memberikan argumen bahwa semakin berpendidikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi, semakin besar kemungkinan organisasi tersebut menjadi mirip satu sama lain dalam hal praktik manajemen (Akbar, 2012).

Penelitian ini kaitannya dengan Isomorfisme Institusional adalah Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola daerah tentu ingin bekerja sebaik mungkin, yang salah satunya tujuannya adalah untuk memperoleh legitimasi atau pengakuan atas kinerjanya. Pemerintah Daerah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu dan kompeten dalam menjalankan serta mengelola pemerintahan. Keinginan tersebut tidak terlepas dari adanya tekanan baik secara formal maupun informal dari sesama lembaga yang ada di pemerintahan maupun dari pihak eksternal serta masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelola daerah, pemerintah daerah memerlukan kepala daerah yang memiliki karakteristik yang tepat, sebab karakteristik kepala daerah berkaitan dengan kualitas dan kapabilitas kepala daerah dalam memimpin daerahnya (Tama & Adi, 2018). Hal tersebut berarti bahwa pada penelitian ini Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ukuran Legislatif merupakan tekanan koersif, serta Karakteristik Kepala Daerah sebagai tekanan normatif dapat menjadi penekan dan faktor yang mendukung Pemerintah Daerah untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kinerja keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat berupa uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan daerah berdasarkan definisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Mahsun (2013) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu bentuk kinerja dalam hal penerimaan dan belanja di bidang keuangan daerah dengan menerapkan sistem keuangan yang telah ditetapkan melalui satu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016). Pengukuran kinerja secara umum merupakan cara untuk menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan (Mahmudi, 2011).

Rasio keuangan digunakan sebagai indikator kinerja keuangan dan juga sebagai salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi. Menurut Mahmudi (2011) hasil analisis rasio keuangan akan digunakan sebagai tolok ukur dalam;

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah.

- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah biasanya dilihat dari total aset, dan juga dapat dilihat dari luas wilayah serta jumlah penduduk. Menurut Kusumawardani (2012) kegiatan operasional daerah akan lebih mudah jika memiliki ukuran pemerintah daerah yang besar, di mana hal tersebut juga akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan membantu dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. Ukuran yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya akan menghampiri pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar.

Ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini merupakan tekanan *coercive isomorphism*, karena dengan ukuran pemerintah daerah yang besar mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kekayaan yang besar pula,

sehingga pengawasan dari masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan pemerintah daerah akan semakin ketat sebab ada kekhawatiran akan timbul penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi. Pengawasan yang ketat dari masyarakat akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja keuangannya secara keseluruhan, sekaligus memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa pemerintah daerah mampu menampilkan kinerja keuangan yang baik.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Lestari, 2017).

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Faktor ekonomi dan faktor non ekonomi menjadi dua macam faktor yang dapat memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang ditekankan pada pertumbuhan ekonomi yakni; proses, *output* per kapita, dan jangka panjang. Ada empat faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2011) yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam akan memudahkan usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, utamanya pada masa awal pertumbuhan ekonomi.
2. Jumlah dan mutu dari penduduk serta tenaga kerja, penduduk yang bertambah dan memiliki keterampilan akan membuat produktivitas bertambah serta pertambahan produksi yang cepat.
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi memegang peran penting dalam upaya mewujudkan ekonomi yang maju.
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat, bagaimana masyarakat bersikap dapat menjadi penentu seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan akses bagi meningkatnya pendapatan asli daerah, sebab pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong adanya investasi yang secara bersamaan investasi tersebut akan memancing adanya perbaikan infrastruktur daerah. Dengan infrastruktur daerah yang baik dan tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari suatu pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai tekanan *coercive isomorphism*. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk menampilkan kinerja yang baik karena dengan pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak pada tingginya investasi serta meningkatnya pendapatan asli daerah, dan dengan hal tersebut maka seharusnya pemerintah daerah dapat menunjukkan kinerja yang baik.

2.1.5 Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif adalah ukuran yang digambarkan dengan jumlah anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD terdiri atas anggota dari partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam struktur pemerintah daerah, DPRD berada pada tiga wilayah administratif, yakni DPRD yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi disebut DPRD Provinsi, DPRD yang ada di kabupaten disebut DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota yang berkedudukan di Kota (Maiyora, 2015).

DPRD merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai peran dan posisi yang strategis termasuk dalam hal pengawasan keuangan daerah. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan mampu meningkatkan kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang diawasi sangat baik salah satunya dari lembaga legislatif akan menghasilkan kinerja yang baik (Kusumawardani, 2012).

Ukuran legislatif pada penelitian ini dapat menjadi tekanan *coercive isomorphism*, karena dengan jumlah anggota DPRD yang banyak maka seharusnya pengawasan kepada pemerintah daerah semakin meningkat. Dengan adanya pengawasan dari DPRD yang terus meningkat, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus meningkatkan pula kinerjanya dan tidak bisa semena-mena dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya karena ada DPRD yang mengawasi.

2.1.6 Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat pendidikan kepala daerah merupakan jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh kepala daerah. Pengetahuan dan kemampuan dasar kepala daerah dapat tergambarkan dari tingkat pendidikan kepala daerah, dan hal tersebut sangat mungkin memengaruhi kepala daerah dalam pengambilan keputusan strategis. Kepala daerah sama halnya dengan manajer, yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih peka terhadap perkembangan terakhir bidang aktivitas organisasi mereka (Noer, 2014).

Tingkat pendidikan kepala daerah merupakan tekanan *normative isomorphism* dalam teori *institutional isomorphism*. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kepala daerah seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik sebab telah dibekali kemampuan dasar dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Eksekutif yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki kognitif yang lebih kompleks (Prayitno, 2012). Kompleksitas kognitif yang dimiliki memungkinkan kepala daerah untuk menerima ide-ide baru untuk meningkatkan inovasi. Tingkat pendidikan dicapai dengan atribut seperti kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengolah informasi, dan penerimaan terhadap inovasi (Mahardini, 2014). Dengan kemampuan mengolah informasi yang baik untuk pengambilan keputusan, serta lebih mudah dalam menyerap ide-ide baru, maka kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi diharapkan akan memberikan kinerja keuangan yang baik.

2.1.7 Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi dirinya. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu karakteristik penting dari seorang kepala daerah, karena dengan latar belakang pendidikan, kita dapat mengetahui bagaimana kompetensi dari kepala daerah. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, perusahaan, dan negara (Widagdo, 2017).

Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap orientasi pandangan dari kepala daerah dalam melakukan pengambilan keputusan maupun saat menghadapi persoalan. Kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi mungkin akan berbeda dengan kepala daerah yang berlatar belakang kesehatan dalam hal pendekatan terhadap organisasinya. Latar belakang pendidikan dapat membantu kepala daerah untuk mengantisipasi suatu konsekuensi dari tindakan dan kelalaian dalam menjalankan program kerja (Mahardini, 2014).

Dalam teori *institutional isomorphism*, latar belakang pendidikan kepala daerah merupakan tekanan *normative isomorphism*. Latar belakang pendidikan akan membantu kepala daerah untuk bekerja lebih baik, terutama dalam hal yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sebagai contoh, mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih baik karena telah didukung oleh ilmu pengetahuan yang diperoleh terkait dengan keuangan. Seorang

individu yang memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi lebih mungkin untuk memahami praktik keuangan dan akuntansi sehingga memengaruhi kinerja keuangan (Prayitno, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari penelitian terdahulu dengan topik serupa yang dijadikan referensi pada penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kusumawardani (2012)	<p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: <i>Size</i>, Kemakmuran, Ukuran Legislatif dan <i>leverage</i></p>	Ukuran Legislatif dan <i>size</i> berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Sementara Kemakmuran dan Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia
2	Maiyora (2015)	<p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Ukuran, Legislatif, <i>Leverage</i>,</p>	Ukuran Pemerintah Daerah dan <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran, ukuran legislatif, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap

		dan <i>Intergovernmental revenue</i>	kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Marhawai (2017)	<p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i></p>	Ukuran, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Sari (2016)	<p>Dependen: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Ukuran Pemerintah, PAD, <i>Leverage</i>, Dana Perimbangan, Ukuran Legislatif</p>	Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan <i>Leverage</i> , Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5.	Nasution (2017)	<p>Dependen: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah</p>	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Heryanti (2019)	Dependen: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh positif terhadap Kinerja

		<p>Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan</p>	<p>Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
7.	Martantri (2019)	<p>Dependen: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, <i>Leverage</i></p>	<p>PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
8.	Mahardini (2014)	<p>Dependen: Kinerja keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Masa Jabatan</p>	<p>Tingkat pendidikan kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan latar belakang pendidikan dan masa jabatan kepala daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah, dan pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset yang besar dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibanding daerah yang ukuran asetnya kecil (Kusumawardani, 2012). Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu didukung dengan aset yang baik pula. Pemerintah daerah yang memiliki aset besar diasumsikan dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, sehingga seiring dengan ukuran aset yang besar tuntutan terhadap kinerja yang baik juga akan meningkat.

Tekanan yang besar dari publik akan ada pada perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar untuk melaporkan pengungkapan wajibnya, dan tekanan tersebut akan berdampak pada tuntutan kinerja yang lebih baik dari perusahaan tersebut (Sumarjo, 2010). Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dalam hal ini aset yang besar akan mendapatkan perhatian dan pengawasan yang besar pula dari masyarakat mengenai kegiatan pengelolaan pemerintah daerah, sebab ada kekhawatiran bahwa akan terjadi penyelewengan terhadap aset yang dimiliki daerah. Pengawasan yang ketat dari masyarakat akan menjadi tekanan *coercive isomorphism* bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya, sekaligus memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa pemerintah daerah mampu mengelola aset daerah dengan baik, karena semakin tinggi tingkat

pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggungjawab dan tingkat kemauan bekerja seseorang terhadap pekerjaannya (Novianti et al., 2016).

Beberapa riset sebelumnya meliputi Sumarjo (2010), Kusumawardani (2012), Maiyora (2015), dan Sari (2016) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam perekonomian yang ditunjukkan dari bertambahnya produksi barang atau jasa serta kemakmuran masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan perekonomian pada suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar dampak aktivitas perekonomian akan menambah pendapatan masyarakat (Martantri, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, maka akan mendorong adanya investasi, kemudian investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah (Jolianis et al., 2013). Dengan infrastruktur daerah yang baik dan dibarengi investasi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan dengan hal tersebut sudah seharusnya kualitas layanan publik yang menjadi

cerminan kinerja suatu pemerintah daerah juga meningkat. Berdasarkan hal tersebut pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai tekanan *coercive isomorphism*, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, secara tidak langsung pemerintah daerah diharuskan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik

Nasution (2017) dan Raharja (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

2.3.3 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Lembaga Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang dalam pengawasan keuangan daerah memiliki peran sangat strategis. Kondisi keuangan daerah merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Lembaga legislatif sangat berperan dalam pembuatan kebijakan publik, salah satunya adalah dalam hal penganggaran daerah dan seharusnya lembaga legislatif memperhatikan berapa besaran pengeluaran pemerintah daerah dan seberapa besar pemasukan yang akan diterima oleh pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan secara sungguh-sungguh terhadap pemerintah daerah termasuk dalam hal keuangan daerah, di mana hal tersebut dapat menjadi tekanan *coercive isomorphism* bagi pemerintah daerah, sebab dengan semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggungjawab dan tingkat kemauan bekerja seseorang terhadap pekerjaannya (Novianti et al., 2016). Tekanan *coercive isomorphism* dalam bentuk pengawasan dari DPRD seharusnya akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya, karena pemerintah daerah tidak bisa semena-mena dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sebab ada pihak lain yang mengawasi yaitu DPRD.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Marhawai (2015) mengenai pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menyimpulkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

2.3.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat pendidikan kepala daerah adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh oleh kepala daerah. Kebijakan dan keputusan strategis yang

diambil oleh kepala daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan dasar dari kepala daerah itu sendiri, di mana hal tersebut dapat diindikasikan dari tingkat pendidikan kepala daerah (Noer, 2014).

Dalam teori *institutional isomorphism*, tingkat pendidikan kepala termasuk ke dalam *normative isomorphism* yaitu proses pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada kinerja organisasi yang lebih baik. Menurut Hitt dan Tayler (dalam Prayitno, 2012) eksekutif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kognitif yang lebih kompleks, sehingga dalam pengambilan keputusan akan terlebih dahulu mengolah informasi dengan lebih dalam. Selain itu, kompleksitas kognitif akan memberikan kemampuan yang lebih baik dalam menyerap ide-ide baru serta kecenderungan untuk menerima inovasi (Mahardini, 2014).

Menurut Becerra (dalam Mahardini, 2014) pendidikan dapat mencerminkan kredibilitas dan memberikan rasa percaya diri bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi dengan pejabat di tingkat yang lebih tinggi untuk memaksimalkan sumber daya daerah, dengan demikian kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan kepala daerah. Esteve et al. (2012) dalam penelitiannya memaparkan bahwa manajer dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan kinerja yang lebih baik terhadap organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardini (2014) dan Prasetyo (2014) mengenai pengaruh tingkat pendidikan kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tingkat Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

2.3.5 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Latar belakang pendidikan kepala daerah adalah jenis pendidikan formal yang ditempuh dan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh kepala daerah. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap pendekatan yang dilakukan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepala daerah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi tentu akan berbeda dalam mengelola pemerintahan dengan kepala daerah yang berlatar belakang kesehatan. Latar belakang pendidikan manajer organisasi memberikan perbedaan dalam melakukan pendekatan strategi (Noer, 2014).

Latar belakang pendidikan kepala daerah merupakan *normative isomorphism* dalam teori *institutional isomorphism*. Dalam penelitian ini kaitannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah maka kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi akan memberikan kinerja yang lebih baik. Latar belakang pendidikan dapat membantu kepala daerah untuk mengantisipasi suatu konsekuensi dari tindakan dan kelalaian dalam menjalankan program kerja (Becerra, 2007 dalam Mahardini, 2014). Organisasi yang menekankan pengukuran keuangan, maka manajer dengan latar belakang terkait keuangan diharapkan akan memberikan kinerja yang lebih baik (Noer, 2014).

Kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi/akuntansi akan lebih mudah untuk memahami kinerja terkait keuangan dan lebih peka terhadap kesalahan dalam kinerja keuangan sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik. Dapat dikatakan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik maka kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi akan mempunyai keunggulan dari kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan lain (Noer, 2014). Prasetyo (2014) dalam penelitiannya menyatakan latar belakang pendidikan yang sesuai berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

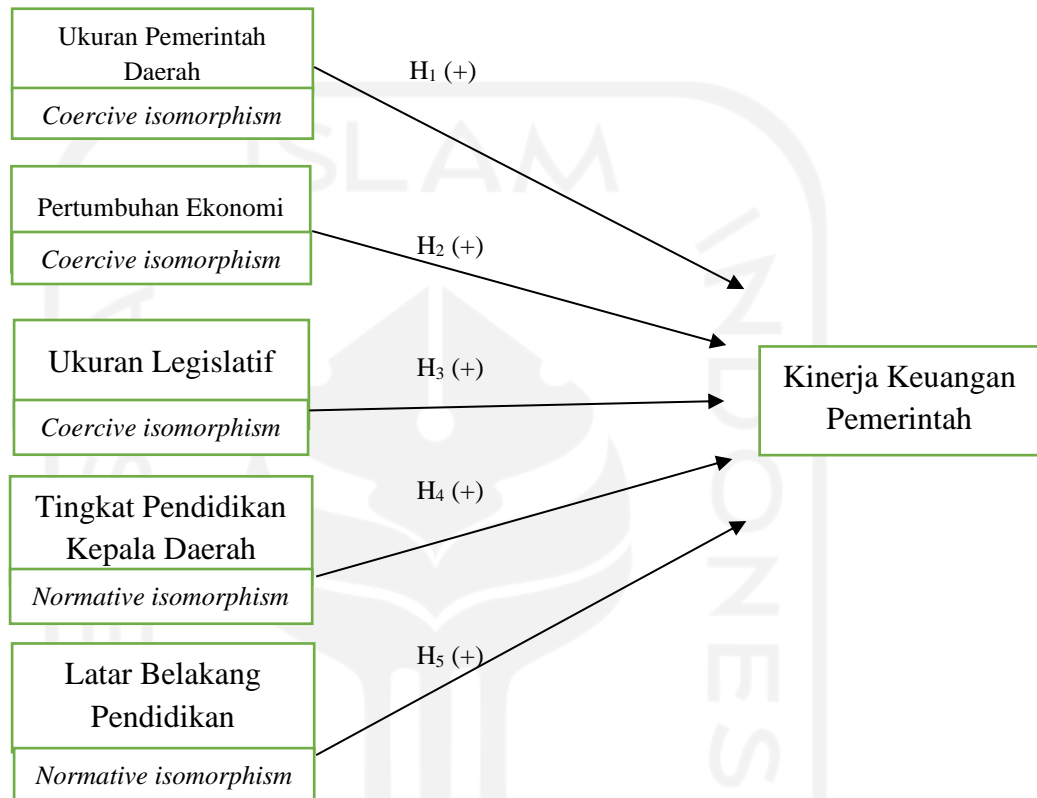
H₅: Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

2.4 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teori *institutional isomorphism* untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun dari tiga tipe yang ada pada teori *institutional isomorphism* hanya digunakan dua di antaranya yaitu *coercive isomorphism* dan *normative isomorphism*. Tekanan *coercive isomorphism* diwakili oleh variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ukuran Legislatif, sedangkan tekanan *normative isomorphism* diwakili oleh variabel Tingkat Pendidikan Kepala Daerah serta Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah. Model penelitian ini digambarkan pada kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian peneliti untuk diteliti (Sekaran & Bougie, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2018. Total populasi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2020) adalah 514 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia telah melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 dan tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 posisi kepala daerah sudah pasti, begitu pula posisi lembaga legislatif daerah juga sudah jelas dan dapat diketahui secara pasti jumlah anggota legislatif masing-masing kabupaten/kota, selain itu data pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota terkini yang telah tersedia adalah tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan tahun 2018 sebagai tahun penelitian.

3.1.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi penelitian (Sekaran dan Bougie, 2010). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu sampel yang digunakan merupakan sampel yang telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diaudit oleh BPK RI.
2. Pemerintah daerah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menampilkan data dan informasi (Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran) pada tahun 2018 yang dapat diakses oleh peneliti.
3. Pemerintah daerah yang menyajikan data dan informasi mengenai karakteristik kepala daerah yang menjabat pada tahun 2018, dan dapat diakses peneliti melalui *website* resmi maupun sumber lain di internet.

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Pada penelitian ini data bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2018 dan data non keuangan seperti jumlah anggota DPRD serta karakteristik kepala daerah. Data diperoleh dari *website* resmi setiap pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain dari internet.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi serta dari sumber

lainnya. Metode dokumentasi adalah metode di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara mendapatkannya dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan informasi non-keuangan lainnya secara daring maupun melalui permintaan informasi secara langsung (Martantri, 2019).

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran pencapaian pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melihat rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah (Saraswati, 2019).

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan semakin baik jika rasio efisiensinya juga semakin kecil (Sari, 2016).

Rumus untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang dapat menjadi penyebab munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen yang ada dalam penelitian ini yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, dan Latar belakang Pendidikan Kepala Daerah.

3.3.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai besar kecilnya suatu objek dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Proksi untuk ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karena aset merupakan ukuran yang relatif stabil (Sumarjo, 2010). Total aset dapat dilihat pada laporan neraca pemerintah daerah.

3.3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perkembangan dalam perekonomian yang ditunjukkan dari bertambahnya produksi barang atau jasa serta meningkatnya kemakmuran masyarakat. Kondisi yang terjadi pada ekonomi suatu daerah dapat tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Parameter dari pertumbuhan ekonomi adalah Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah terbentuknya nilai tambah dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (Raharja, 2017). Berikut adalah rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi.

$$Gt = \frac{(PDBt - PDBt - 1)}{PDBt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulan atau tahunan)

PDB (t) = Produk Domestik Bruto Periode t (berdasarkan harga konstan)

PDB (t-1) = Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya

Dalam penelitian ini data Pertumbuhan Ekonomi diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa menghitung sendiri.

3.3.2.3 Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif atau DPRD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Semakin besar ukuran legislatif semakin besar pula dampak dari tugas dan wewenang lembaga legislatif, termasuk dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sesotyanytyas, 2012). Ukuran legislatif dapat diukur dari jumlah anggota DPRD setiap Kabupaten/Kota. Jumlah anggota DPRD bisa diperoleh dari situs resmi masing-masing pemerintah daerah.

3.3.2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah dan disahkan oleh departemen pendidikan (Noer, 2014). Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, persyaratan untuk menjadi bupati dan wali

kota adalah minimal berpendidikan SLTA. Klasifikasi tingkat pendidikan pada penelitian ini terdiri dari: SLTA, Diploma, S1, S2, dan S3.

SLTA : dilambangkan dengan angka 1

Diploma : dilambangkan dengan angka 2

S1 : dilambangkan dengan angka 3

S2 : dilambangkan dengan angka 4

S3 : dilambangkan dengan angka 5

3.3.2.5 Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan jenis pendidikan yang sebelumnya ditempuh oleh seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan tertentu, yang nantinya akan diterapkan dalam pekerjaannya (Mahardini, 2014). Latar belakang pendidikan merupakan karakteristik penting dari kepala daerah, karena dari latar belakang pendidikan kita dapat mengetahui bagaimana kompetensi kepala daerah.

Anggaran suatu perusahaan akan lebih teliti dan detail jika manajer perusahaan memiliki latar belakang keuangan (Bamber *et al.*, 2010). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala daerah yang memiliki latar belakang keuangan atau ekonomi akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Pada penelitian ini latar belakang pendidikan diukur berdasar pada apakah kepala daerah memiliki latar belakang lulusan ekonomi atau non-ekonomi. Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi dilambangkan dengan angka 1, sedangkan kepala daerah dengan latar belakang pendidikan non-ekonomi dilambangkan dengan angka 0.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode-metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif akan menjelaskan data variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2018).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji ketepatan dalam estimasi, konsistensi, dan ketidakbiasaan dari model regresi yang diajukan dalam penelitian. Uji asumsi klasik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum berlanjut pada pengujian hipotesis melalui analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik terdiri dari:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependen, dan independen mempunyai distribusi normal. Data yang memiliki distribusi normal merupakan data yang baik, sehingga layak digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui apakah normal atau tidaknya distribusi dari data residual, dapat melakukan uji statistik non parametrik *One Sample Kolmogorov-smirnov* (K-S). Apabila hasil *One Sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual berdistribusi dengan normal. Sedangkan apabila hasil *One Sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dengan program *Statistical Product and service Solution* (SPSS), dapat diketahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yaitu dengan melihat besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Regresi dikatakan bebas dari masalah Multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai *VIF* kurang dari 10,00 (Sugiyono, 2017).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dalam model regresi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak berubah, maka disebut dengan homoskedastisitas namun jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang homoskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian, dapat menggunakan uji Glejser dengan program SPSS. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut terhadap variabel independen. Jika hasil uji Glejser menunjukkan koefisien parameter beta > 0.05 dipastikan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = kinerja keuangan pemerintah daerah (variabel dependen)

a = konstanta

$b_1b_2b_3b_4b_5$ = koefisien regresi model

X₁ = ukuran pemerintah daerah

X₂ = pertumbuhan ekonomi

X₃ = ukuran legislatif

X₄ = tingkat pendidikan

X₅ = *background* pendidikan

ε = *error*

3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk menyatakan besar atau kecilnya kontribusi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) besarnya hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil menandakan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1

menandakan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Analisis yang menggunakan regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Namun apabila regresi sederhana, maka *R Square* yang digunakan. *Adjusted R Square* adalah nilai yang ditunjukkan pada koefisien determinan, karena *Adjusted R Square* dapat naik ataupun turun apabila suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2018).

3.4.5 Uji Parsial (Uji T)

Uji T dapat memperlihatkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen secara parsial dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila signifikansinya $< 0,05$. Namun, jika signifikansinya $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio efisiensi dan analisis terhadap variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, tingkat pendidikan kepala daerah, serta latar belakang pendidikan kepala daerah.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 130 sampel, dalam analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya minimal sepuluh kali dari jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2010). Setelah proses pengumpulan data, terpilih 130 sampel Kabupaten dan Kota di Indonesia yang menampilkan data, dan data tersebut dapat diakses oleh peneliti. Sampel dipilih secara *random*, namun tetap memperhatikan keterwakilan setiap provinsi di Indonesia, di mana setiap provinsi minimal diwakilkan oleh satu kabupaten/kota sebagai sampel penelitian. Data pada sampel berupa data keuangan yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, dan data non keuangan yaitu jumlah anggota legislatif, serta *background* dan tingkat pendidikan kepala daerah.

Tabel 4.1**Daftar Sampel Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten dan Kota	No.	Kabupaten dan Kota
1.	Kota Ambon	66.	Kab. Lumajang
2.	Kota Balikpapan	67.	Kab. Luwu
3.	Kota Banda Aceh	68.	Kota Magelang
4.	Kota Bandar Lampung	69.	Kab. Majalengka
5.	Kab. Bandung	70.	Kab. Majene
6.	Kab. Bangka	71.	Kab. Malaka
7.	Kab. Bangka Selatan	72.	Kota Malang
8.	Kab. Bangli	73.	Kab. Maluku Tengah
9.	Kab. Banjar	74.	Kab. Mamuju
10.	Kota Banjarmasin	75.	Kota Mataram
11.	Kab. Banjarnegara	76.	Kota Metro
12.	Kab. Bantaeng	77.	Kab. Minahasa
13.	Kab. Bantul	78.	Kab. Morowali Utara
14.	Kab. Banyumas	79.	Kab. Muaro Jambi
15.	Kab. Batanghari	80.	Kab. Muna
16.	Kab. Belitung	81.	Kab. Musi Banyuasin
17.	Kota Bengkulu	82.	Kab. Nabire
18.	Kab. Bengkulu Utara	83.	Kab. Ngawi
19.	Kab. Bima	84.	Kab. Nunukan
20.	Kab. Bintan	85.	Kota Padang
21.	Kab. Blitar	86.	Kota Palangkaraya
22.	Kab. Blora	87.	Kota Palembang
23.	Kab. Bolaang Mongondow	88.	Kota Palopo
24.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	89.	Kota Palu
25.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	90.	Kab. Pamekasan
26.	Kab. Bone	91.	Kota Parepare
27.	Kab. Boyolali	92.	Kab. Parigi Moutong
28.	Kab. Brebes	93.	Kab. Pasaman
29.	Kota Bukittinggi	94.	Kab. Pekalongan
30.	Kab. Buton	95.	Kota Pekalongan
31.	Kab. Ciamis	96.	Kota Pekanbaru
32.	Kab. Cilacap	97.	Kab. Pohuwato
33.	Kota Cilegon	98.	Kab. Ponorogo

34.	Kab. Demak		99.	Kota Pontianak
35.	Kota Denpasar		100.	Kab. Pringsewu
36.	Kab. Dompu		101.	Kota Probolinggo
37.	Kota Dumai		102.	Kab. Purbalingga
38.	Kab. Flores Timur		103.	Kab. Purwakarta
39.	Kab. Gianyar		104.	Kab. Purworejo
40.	Kab. Gorontalo		105.	Kab. Rembang
41.	Kota Gorontalo		106.	Kota Sabang
42.	Kab. Gowa		107.	Kab. Samosir
43.	Kab. Gunungkidul		108.	Kab. Semarang
44.	Kota Gunungsitoli		109.	Kab. Sidoarjo
45.	Kota Jambi		110.	Kab. Simeulue
46.	Kota Jayapura		111.	Kab. Sinjai
47.	Kab. Jepara		112.	Kab. Situbondo
48.	Kab. Kampar		113.	Kab. Sleman
49.	Kab. Karanganyar		114.	Kab. Soppeng
50.	Kab. Kebumen		115.	Kab. Sukabumi
51.	Kab. Kediri		116.	Kab. Sukoharjo
52.	Kota Kendari		117.	Kab. Sumba Timur
53.	Kab. Kepulauan Anambas		118.	Kab. Sumbawa Barat
54.	Kab. Ketapang		119.	Kota Surakarta
55.	Kab. Klungkung		120.	Kab. Tabanan
56.	Kota Kotamobagu		121.	Kab. Tana Tidung
57.	Kab. Kotawaringin Barat		122.	Kab. Tanjung Jabung Barat
58.	Kab. Kudus		123.	Kota Tanjungpinang
59.	Kab. Kutai Timur		124.	Kota Tarakan
60.	Kab. Labuhanbatu Utara		125.	Kab. Tasikmalaya
61.	Kab. Lampung Barat		126.	Kab. Tegal
62.	Kab. Lampung Selatan		127.	Kota Tegal
63.	Kab. Lebak		128.	Kota Ternate
64.	Kab. Lebong		129.	Kab. Tuban
65.	Kota Lhokseumawe		130.	Kab. Wonogiri

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif akan menampilkan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat melalui nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik Deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
Ukuran Pemerintah	130	975.190	17.377.400	3.460.804	2.504.515
Pertumbuhan Ekonomi	130	1,92	8,91	5,59	1,1385
Ukuran Legislatif	130	20	50	37,26	9,727
Kinerja Keuangan	130	0,781	1,033	0,895	0,0703

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ukuran pemerintah daerah adalah 3.460.804, dengan standar deviasi 2.504.515. Nilai minimum ukuran pemerintah daerah dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan nilai 975.190, sedangkan nilai maksimum menjadi milik Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 17.377.400.

Pada pertumbuhan ekonomi, nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Kampar dengan nilai 1,92%, sedangkan nilai maksimum sebesar 8,91% dimiliki oleh Kabupaten Bone. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,59% dengan standar deviasi 1,1385.

Nilai minimum dari ukuran legislatif adalah 20, nilai tersebut dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Tana Tidung. Nilai maksimum ukuran legislatif adalah 50, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai tersebut. Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi adalah 37,26 dengan standar deviasi 9,727.

Nilai rata-rata dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 0,895. Nilai tersebut berarti kinerja keuangan pemerintah daerah cukup efisien karena bernilai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Nilai minimum atau efisiensi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow dengan nilai 0,781. Sedangkan nilai maksimum atau efisiensi terendah sebesar 1,033 menjadi milik Kota Lhokseumawe.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Percent
SLTA	12	9,2
Diploma	1	0,8
S1	49	37,7
S2	55	42,3
S3	13	10
TOTAL	130	100

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa S2 adalah tingkat pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh kepala daerah. Sebanyak 55 kepala daerah memiliki jenjang pendidikan S2, diantaranya kepala daerah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Bandung, Kota Cilegon, Kota Kendari, Kota Magelang, dan 50 kepala daerah lainnya. Sedangkan Diploma menjadi yang paling sedikit dengan hanya 1 kepala daerah yaitu kepala daerah Kabupaten Demak.

Tabel 4.4
Background Pendidikan Kepala Daerah

Background Pendidikan	Frekuensi	Percent
Non-Ekonomi	98	75,4
Ekonomi	32	24,6
TOTAL	130	100

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa lebih banyak kepala daerah yang memiliki *background* pendidikan non-ekonomi yaitu sebanyak 98 kepala daerah.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi linear berganda dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Untuk melakukan uji normalitas, maka digunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.5.

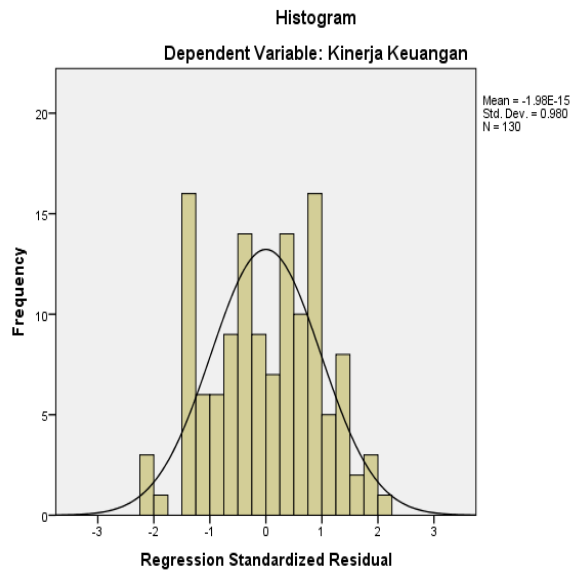
Tabel 4.5
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
n	130
Asymp Sig. (2-tailed)	0,528

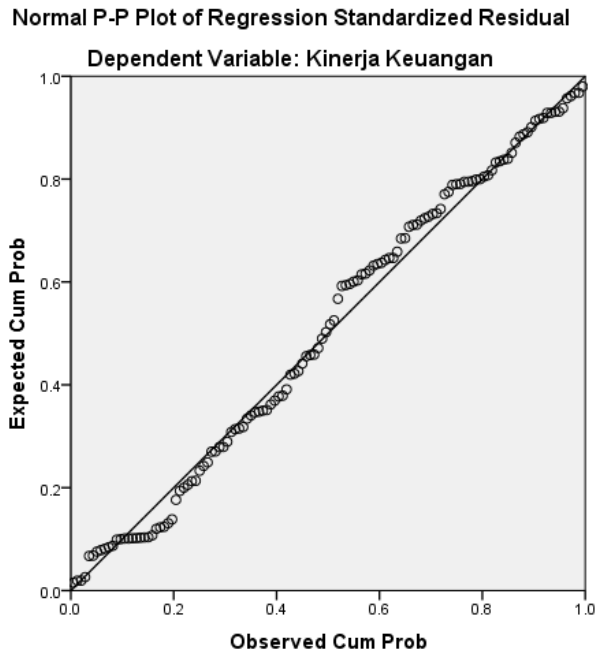
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai signifikansi *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah 0,528. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data residual berdistribusi normal. Pada gambar 4.1 ditampilkan histogram dari uji normalitas.

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas



Gambar 4.2 P-P Plot Uji Normalitas



Pada gambar 4.2 terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan pola distribusi data yang normal sehingga layak digunakan untuk penelitian.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Regresi bebas dari multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Ukuran Pemerintah	0,549	1,823
Pertumbuhan Ekonomi	0,962	1,039
Ukuran Legislatif	0,525	1,907
Tingkat Pendidikan	0,880	1,136
<i>Background</i> Pendidikan	0,957	1,045

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari semua variabel kurang dari 10. Hal tersebut berarti tidak terdapat korelasi antar variabel, dan model regresi bebas dari multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk melanjutkan penelitian.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikansi pada uji glejser lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.7.

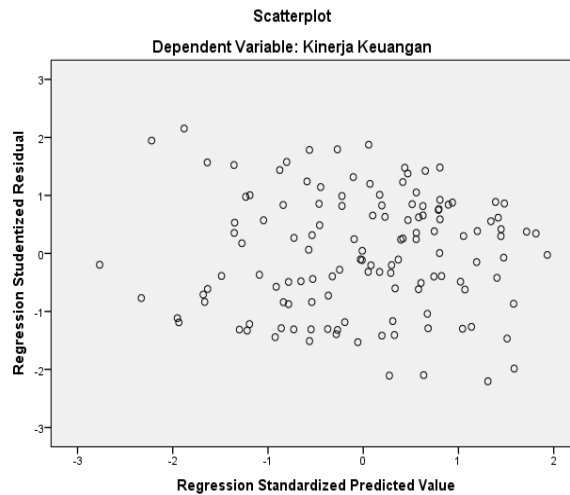
Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Nilai Sig.
Ukuran Pemerintah	0,760
Pertumbuhan Ekonomi	0,653
Ukuran Legislatif	0,663
Tingkat Pendidikan	0,112
<i>Background</i> Pendidikan	0,982

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel independen pada uji glejser lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Gambar 4.3 di bawah memperlihatkan hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot*.

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*



Pada gambar 4.3 terlihat titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui kekuatan pengaruh ukuran pemerintah daerah (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2), ukuran legislatif (X_3), tingkat pendidikan (X_4), *background* pendidikan (X_5) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig.
(Constant)	1,286	0,367	3,507	0,001
Ukuran Pemerintah (X1)	0,061	0,015	4,102	0,000
Pertumbuhan ekonomi (X2)	0,006	0,028	0,197	0,844
Ukuran Legislatif (X3)	0,148	0,031	4,786	0,000
Tingkat Pendidikan (X4)	0,042	0,016	2,560	0,012
Background Pendidikan (X5)	0,018	0,015	1,195	0,234

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan} = 1,286 + 0,061(\text{Ukuran Pemerintah}) + 0,006(\text{Pertumbuhan Ekonomi}) + 0,148(\text{Ukuran Legislatif}) + 0,042(\text{Tingkat Pendidikan}) + 0,018(\text{Background Pendidikan})$$

Berikut interpretasi persamaan regresi linear berganda di atas:

1. Pada persamaan diperoleh nilai konstanta sebesar 1,286 yang berarti variabel kinerja keuangan pemerintah daerah hasilnya konstan tanpa dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar 1,286.

2. Koefisien variabel dari ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 0,061 yang berarti ketika ukuran pemerintah daerah meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,061.
3. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,006 yang berarti ketika variabel pertumbuhan ekonomi meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,006.
4. Koefisien variabel ukuran legislatif adalah sebesar 0,148 yang berarti apabila ukuran legislatif meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,148.
5. Koefisien variabel tingkat pendidikan adalah sebesar 0,042 yang berarti apabila variabel tingkat pendidikan meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,042.
6. Koefisien variabel *background* pendidikan adalah 0,018 yang berarti apabila variabel *background* pendidikan meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,018.

4.5 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk menyatakan besar atau kecilnya kontribusi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) besarnya hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Analisis Koefisien Determinasi

R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,439	0,192	0,160

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,160 atau 16%. Nilai tersebut berarti bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, tingkat pendidikan, dan *background* pendidikan memiliki pengaruh kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 16%. Sedangkan 84% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak menjadi variabel independen di penelitian ini.

4.6 Uji Parsial (Uji T)

Uji T dapat memperlihatkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen secara parsial dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila signifikansinya $< 0,05$. Namun, jika signifikansinya $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Uji Parsial (Uji T)

Model	<i>Unstandarized Coefficients</i>		
	B	T	Sig.
(Constant)	1,286	3,507	0,001
Ukuran Pemerintah (X1)	0,061	4,102	0,000
Pertumbuhan ekonomi (X2)	0,006	0,197	0,844
Ukuran Legislatif (X3)	0,148	4,786	0,000
Tingkat Pendidikan (X4)	0,042	2,560	0,012
<i>Background</i> Pendidikan (X5)	0,018	1,195	0,234

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H_1 diterima.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,844 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H_2 ditolak.
3. Variabel ukuran legislatif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H_3 diterima.

4. Variabel tingkat pendidikan kepala daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H_4 diterima.
5. Variabel *background* pendidikan kepala daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,234 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti *background* pendidikan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, H_5 ditolak.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai Beta 0.061 (positif). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah atau total aset yang dimiliki daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Sebagai contoh adalah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki total aset sebesar 17.377.441.188.340, yang terbesar dalam sampel penelitian ini. Kabupaten Sidoarjo memiliki kinerja keuangan yang baik, ditandai dengan nilai kinerja keuangan yang di bawah 1 yaitu 0,849.

Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah daerah juga perlu didukung dengan aset yang baik, dan ketika pemerintah daerah berhasil memberikan pelayanan yang baik, akan lebih mudah bagi pemerintah daerah untuk memperoleh legitimasi. Pemerintah daerah yang memiliki aset besar mempunyai potensi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, sehingga tuntutan terhadap kinerja yang baik akan meningkat seiring dengan ukuran aset yang besar. Ukuran pemerintah daerah yang besar mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kekayaan yang besar, sehingga pengawasan dari masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan pemerintah daerah akan semakin tinggi karena kekhawatiran timbulnya penyelewengan dana yang mungkin terjadi lebih tinggi. Pengawasan yang ketat dari masyarakat akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja keuangannya secara keseluruhan, sekaligus memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa pemerintah daerah kompeten untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik.

Hasil dari penelitian ini sejirama dengan penelitian Kusumawardani (2012), Maiyora (2015), dan Sari (2016) yang juga menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil penelitian ini terlihat tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, nilai signifikansi 0,844 yang lebih besar dari 0,05 menjadi bukti akan hal tersebut. Sehingga kenaikan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi pada suatu kabupaten/kota di Indonesia tidak akan berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai contoh Kota Palopo, meskipun memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 7,52 namun kinerja keuangannya tidak cukup baik, terlihat dari nilai kinerja keuangan yang lebih dari 1 yaitu 1,019.

Pertumbuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan infrastruktur dan sarana prasarana. Jika sarana dan prasarana suatu daerah baik maka akan membuat aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi nyaman dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Infrastruktur yang baik juga akan mendorong adanya investasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Jolianis et al., 2013). Namun pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini kemungkinan karena pertumbuhan ekonomi di daerah belum bisa secara maksimal menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Selain itu, infrastruktur dan sarana prasarana daerah juga belum mendukung peningkatan investasi dan produktivitas masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, padahal pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju (Tamawiwiy et al., 2016).

Hasil dari penelitian ini seirama dengan penelitian Kurniawati (2015) dan Martantri (2019) yang juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.3 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai Beta 0.148 (positif). Hal tersebut berarti semakin besar ukuran legislatif suatu daerah, maka pemerintah daerah akan semakin baik dalam hal kinerja keuangan. Contohnya adalah Kabupaten Demak yang memiliki cukup banyak anggota DPRD yaitu 50 anggota, juga memiliki kinerja keuangan yang baik, dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi yang kurang dari 1 yaitu 0,794.

Lembaga legislatif memiliki peran dan fungsi yang strategis terhadap pengawasan keuangan pemerintah daerah, yang apabila dengan baik dilaksanakan akan memberi dampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang meningkat. Pengawasan dari lembaga legislatif dapat menjadi tekanan *coercive isomorphism* bagi pemerintah daerah, sebab dengan semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggungjawab dan tingkat kemauan bekerja seseorang terhadap pekerjaannya (Novianti et al., 2016). Semakin besar atau banyak anggota legislatif akan semakin mudah dan ringan bagi lembaga legislatif untuk menjalankan tugas pengawasannya kepada pemerintah daerah, yang akan

berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga jika suatu daerah diharapkan kinerja keuangannya baik dan meningkat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menambah kekuatan lembaga legislatif dengan jumlah anggota legislatif yang lebih banyak supaya dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Marhawai (2017) yang juga menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat pendidikan kepala daerah berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai Beta 0.042 (positif). Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala daerah, maka pemerintah daerah yang dipimpin akan semakin baik dalam hal kinerja keuangan. Sebagai contoh adalah Kabupaten Bone yang memiliki kepala daerah dengan tingkat pendidikan S3, nilai kinerja keuangannya kurang dari 1 yaitu 0,815, menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki kinerja keuangan yang baik.

Kepala daerah dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis sangat mungkin dipengaruhi oleh pengalaman serta pengetahuan dasar yang dimiliki kepala daerah, di mana pengetahuan dasar dapat tercermin dari tingkat pendidikan

kepala daerah. Menurut Hitt dan Tayler (dalam Prayitno, 2012) pimpinan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki kognitif yang lebih kompleks, dan ketika mengambil keputusan akan terlebih dahulu mengolah informasi dengan lebih dalam, sehingga kinerja yang dihasilkan akan baik. Menurut Becerra (dalam Mahardini, 2014) pendidikan dapat mencerminkan kredibilitas dan memberikan rasa percaya diri bagi kepala daerah untuk membangun komunikasi dengan pejabat di tingkat yang lebih tinggi untuk memaksimalkan sumber daya daerah, dengan demikian kinerja pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan kepala daerah. Tingkat pendidikan yang sesuai menjadi modal berharga bagi kepala daerah untuk memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola pemerintahan sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, dukungan dari perangkat daerah dengan tingkat pendidikan yang sesuai juga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik, sehingga perlu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kompetensi dari perangkat daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardini (2014), bahwa kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya keuangan, sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

4.7.5 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *background* pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,234 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti *background* pendidikan kepala daerah baik yang ekonomi ataupun non-ekonomi tidak berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kota Metro meskipun memiliki kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi namun kinerja keuangannya tidak baik, ditandai dengan nilai kinerja keuangan yang lebih dari 1 yaitu 1,020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kepala daerah yang memiliki *background* pendidikan ekonomi tidak bisa dipastikan kinerja keuangannya akan lebih baik dari pemerintah daerah lain. Begitu pula dengan seorang kepala daerah yang memiliki *background* non-ekonomi belum tentu akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Hal tersebut kemungkinan karena selain kepala daerah yang berperan dalam kinerja keuangan, terdapat pula peran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menghasilkan laporan keuangan yang bisa menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan yang baik adalah hasil kerja kolektif dan kepala daerah tentu akan dibantu oleh banyak orang dalam lingkup pemerintah daerah untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik (Pratolo et al., 2017). Banyak faktor lain yang memengaruhi baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah, dan *background* pendidikan kepala daerah bukanlah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hal tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardini (2014) yang menyatakan bahwa ternyata *background* pendidikan kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah yang besar mengindikasikan pemerintah daerah memiliki kekayaan yang besar pula, sehingga pengawasan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin ketat. Pengawasan yang ketat dari masyarakat akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan kinerja keuangan yang lebih baik, sekaligus memperoleh pengakuan dari masyarakat. Kabupaten Sidoarjo yang memiliki total aset terbesar dalam sampel penelitian ini yaitu sebesar 17.377.441.188.340, memiliki kinerja keuangan yang baik, ditandai dengan nilai kinerja keuangan yang di bawah 1 yaitu 0,849.
2. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan positif atau negatif ekonomi suatu daerah yang berdampak pada infrastruktur daerah mungkin belum mendukung peningkatan investasi dan produktivitas masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, padahal pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan keuangan daerah yang maju. Kota Palopo meskipun memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 7,52 namun kinerja

keuangannya tidak cukup baik, terlihat dari nilai kinerja keuangan yang lebih dari 1 yaitu 1,019.

3. Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah anggota legislatif yang banyak akan membuat lembaga legislatif lebih mudah dalam menjalankan peran dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggungjawab dan kemauan dalam bekerja, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Demak yang memiliki cukup banyak anggota DPRD yaitu 50 anggota, juga memiliki kinerja keuangan yang baik, dilihat dari nilai kinerja keuangannya yang kurang dari 1 yaitu 0,794.
4. Tingkat Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemimpin dengan tingkat pendidikan tinggi dapat mengolah informasi dengan lebih baik, termasuk dalam hal informasi keuangan, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Bone yang memiliki kepala daerah dengan tingkat pendidikan S3, nilai kinerja keuangannya kurang dari 1 yaitu 0,815, menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki kinerja keuangan yang baik.
5. Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah berdasar pada banyak faktor, dan merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah, sementara *background* pendidikan kepala daerah bukanlah

faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kota Metro meskipun memiliki kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi namun kinerja keuangannya tidak baik, terlihat dari nilai kinerja keuangan yang lebih dari 1 yaitu 1,020.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil akhir penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan penelitian:

1. Tidak semua kabupaten/kota mempublikasikan secara lengkap laporan keuangan daerahnya, dan harus menunggu cukup lama untuk mendapat respons BPK RI terkait permohonan informasi laporan keuangan.
2. Pada beberapa kabupaten/kota, data pertumbuhan ekonomi masih merupakan angka sementara.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil, kesimpulan, dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih banyak lagi sampel pemerintah daerah atau jangka waktu yang lebih lama, sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat tergambar secara lebih dalam kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Menambahkan variabel mengenai karakteristik kepala daerah, misalnya masa jabatan, umur kepala daerah, atau variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2012). "Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia". *Artikel Dosen EBNEWS Edisi 13 Tahun 2012*. <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/830-institutional-isomorphism-dalam-akuntabilitas-kinerja-sektor-publik-di-indonesia>
- Astuti, S., & Mispriyanti. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah. *Fintech Dan E-Commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM Dan Industri Kreatif*. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/2096>
- Bamber, G. J., Philippe Pochet, Cameron Allan, Frank Burchill, Grant Fitzner, Ben French, Stacy Hickox dkk. (2010). Regulating Employment Relations, Work and Labour Laws. *Bulletin of Comparative Labour Relations*, 74.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationally in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Erniza, D., Zaitul, Z., & Yunilma, Y. (2015). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Terhadap Audit Report Lag (Pada Pemerintah Daerah Pulau Sumatera. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1) August 2015.
- Esteve, M., G. Boyne, V. Sierra & T. Ysa. (2012). Oragnizational in the Public Sector: Do Chief Executives Make a Difference? *Journal of Public Administration Research and Theory* 23(4): 927-952. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus035>
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(3), 283–307. <https://doi.org/10.1093/jopart/muh028>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, M., & Abdullah. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Gaji Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. *Journal Of Economic Management & Business* -, 17(1), 9–26.
- Heryanti, C. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Stiesia Surabaya*.

- Jolianis, J., Asrizal, A., & Wulandari, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). *Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 29795.
- Khubiyati, A., & Arifin, J. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–20.
- Kurniawati, E. M. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Baru di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35.
- Lastiar Hutapea, H., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>
- Lestari, D. (2017). Dampak investasi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. *Forum Ekonomi*, 18(2), 176–186.
- Mahardini, N. Y. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Lokasi Pemerintahan, Jumlah Populasi dan Besar APBD sebagai Variabel Kontrol. *Universitas Sebelas Maret*.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Maiyora, G. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Studi Empiris Kabupaten/kota di Pulau Sumatera). *Universitas Riau*.
- Marhawai, M. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 sd 2014). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 49–58.

- Martantri, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017). *Universitas Islam Indonesia*.
- Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Universitas Negeri Semarang*.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, Vol. 8 No.(Issue Vol 8 No 1 (2017): Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik), 1–19.
- Nordiawan, Deddi & Ayuningtyas Hertianti. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* (2ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Noer, I. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). *Universitas Sebelas Maret*.
- Novianti, R., Puspa, D. F., & Putri, D. (2016). Pengaruh Ukuran Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9(1).
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 571–582. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7074>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Pramesti, K. S., Prayudi, M. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Teori Institusional dan Kualitas Penyusunan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Prasetyo, A. (2014). *Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Pratolo, S., Yaya, R., & Sofyani, H. (2017). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Prayitno, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Sebelas Maret*.
- Raharja, A. K. Y., Suharno, & Harimurti, F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengganguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Soloraya Periode 2013–2015). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, 198–204.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpek.12789.18.2.2016>
- Sari, I., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sekaran, Uma & Roger Bougie (2010). *Research Methods for Bussiness: A Skill Building Approach*. New York: John Willey.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). The Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(2), 65–71. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71>

- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 153–173.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta*, 1–76.
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1(1), 91–113.
- Tamawiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 7(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13555>
- Widagdo, A. K., & Munir, M. B. (2017). Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 303–330.
- Wikke, S. R. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Wungow, J. F., Lambey, L., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 7(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13560>
- <https://www.bps.go.id/> Diakses Rabu 20 Januari 2021
- <https://e-ppid.bpk.go.id/lhp/2> Diakses Sabtu 23 Januari 2021

LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten dan Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kota Balikpapan
3.	Kota Banda Aceh
4.	Kota Bandar Lampung
5.	Kab. Bandung
6.	Kab. Bangka
7.	Kab. Bangka Selatan
8.	Kab. Bangli
9.	Kab. Banjar
10.	Kota Banjarmasin
11.	Kab. Banjarnegara
12.	Kab. Bantaeng
13.	Kab. Bantul
14.	Kab. Banyumas
15.	Kab. Batanghari
16.	Kab. Belitung
17.	Kota Bengkulu
18.	Kab. Bengkulu Utara
19.	Kab. Bima
20.	Kab. Bintan
21.	Kab. Blitar
22.	Kab. Blora
23.	Kab. Bolaang Mongondow
24.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
25.	Kab. Bolaang Mongondow Timur

26.	Kab. Bone
27.	Kab. Boyolali
28.	Kab. Brebes
29.	Kota Bukittinggi
30.	Kab. Buton
31.	Kab. Ciamis
32.	Kab. Cilacap
33.	Kota Cilegon
34.	Kab. Demak
35.	Kota Denpasar
36.	Kab. Dompu
37.	Kota Dumai
38.	Kab. Flores Timur
39.	Kab. Gianyar
40.	Kab. Gorontalo
41.	Kota Gorontalo
42.	Kab. Gowa
43.	Kab. Gunungkidul
44.	Kota Gunungsitoli
45.	Kota Jambi
46.	Kota Jayapura
47.	Kab. Jepara
48.	Kab. Kampar
49.	Kab. Karanganyar
50.	Kab. Kebumen
51.	Kab. Kediri
52.	Kota Kendari
53.	Kab. Kepulauan Anambas
54.	Kab. Ketapang
55.	Kab. Klungkung

56.	Kota Kotamobagu
57.	Kab. Kotawarungin Barat
58.	Kab. Kudus
59.	Kab. Kutai Timur
60.	Kab. Labuhanbatu Utara
61.	Kab. Lampung Barat
62.	Kab. Lampung Selatan
63.	Kab. Lebak
64.	Kab. Lebong
65.	Kota Lhokseumawe
66.	Kab. Lumajang
67.	Kab. Luwu
68.	Kota Magelang
69.	Kab. Majalengka
70.	Kab. Majene
71.	Kab. Malaka
72.	Kota Malang
73.	Kab. Maluku Tengah
74.	Kab. Mamuju
75.	Kota Mataram
76.	Kota Metro
77.	Kab. Minahasa
78.	Kab. Morowali Utara
79.	Kab. Muaro Jambi
80.	Kab. Muna
81.	Kab. Musi Banyuasin
82.	Kab. Nabire
83.	Kab. Ngawi
84.	Kab. Nunukan
85.	Kota Padang

86.	Kota Palangkaraya
87.	Kota Palembang
88.	Kota Palopo
89.	Kota Palu
90.	Kab. Pamekasan
91.	Kota Parepare
92.	Kab. Parigi Moutong
93.	Kab. Pasaman
94.	Kab. Pekalongan
95.	Kota Pekalongan
96.	Kota Pekanbaru
97.	Kab. Pohuwato
98.	Kab. Ponorogo
99.	Kota Pontianak
100.	Kab. Pringsewu
101.	Kota Probolinggo
102.	Kab. Purbalingga
103.	Kab. Purwakarta
104.	Kab. Purworejo
105.	Kab. Rembang
106.	Kota Sabang
107.	Kab. Samosir
108.	Kab. Semarang
109.	Kab. Sidoarjo
110.	Kab. Simeulue
111.	Kab. Sinjai
112.	Kab. Situbondo
113.	Kab. Sleman
114.	Kab. Soppeng
115.	Kab. Sukabumi

116.	Kab. Sukoharjo
117.	Kab. Sumba Timur
118.	Kab. Sumbawa Barat
119.	Kota Surakarta
120.	Kab. Tabanan
121.	Kab. Tana Tidung
122.	Kab. Tanjung Jabung Barat
123.	Kota Tanjungpinang
124.	Kota Tarakan
125.	Kab. Tasikmalaya
126.	Kab. Tegal
127.	Kota Tegal
128.	Kota Ternate
129.	Kab. Tuban
130.	Kab. Wonogiri

LAMPIRAN 2

Data Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	Ukuran Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi	Ukuran Legislatif	Tingkat Pendidikan	Background Pendidikan	Kinerja Keuangan
1	Kota Ambon	1.626.855.311.744	6,21	35	3	0	0,955
2	Kota Balikpapan	11.074.760.685.563	4,95	45	3	1	0,950
3	Kota Banda Aceh	5.615.309.114.795	4,49	30	4	1	0,921
4	Kota Bandar Lampung	4.845.482.340.685	6,21	50	4	0	1,012
5	Kab. Bandung	11.074.760.685.563	6,26	50	4	0	0,867
6	Kab. Bangka	1.906.039.597.185	4,51	35	4	0	0,868
7	Kab. Bangka Selatan	1.459.982.642.593	4,52	25	4	1	0,920
8	Kab. Bangli	1.220.625.989.069	5,50	30	4	0	0,816
9	Kab. Banjar	3.539.665.058.842	5,01	45	1	0	0,958
10	Kota Banjarmasin	5.185.127.545.798	6,38	45	4	0	0,911
11	Kab. Banjarnegara	4.346.834.182.090	5,67	45	1	0	1,021
12	Kab. Bantaeng	2.183.076.810.811	8,13	25	5	0	0,898
13	Kab. Bantul	3.255.020.103.752	5,47	45	3	0	0,854
14	Kab. Banyumas	6.419.865.052.453	6,45	50	3	0	0,839
15	Kab. Batanghari	1.781.076.477.942	4,96	35	3	0	0,813
16	Kab. Belitung	2.075.843.726.925	5,37	25	3	0	0,866
17	Kota Bengkulu	1.798.913.543.678	5,48	35	3	1	0,943
18	Kab. Bengkulu Utara	1.611.320.910.558	4,81	30	3	0	0,818
19	Kab. Bima	2.524.415.074.449	4,06	45	3	1	0,898
20	Kab. Bintan	2.476.251.173.058	4,85	25	3	0	0,965
21	Kab. Blitar	4.039.394.668.251	5,10	50	4	1	0,939
22	Kab. Blora	2.916.854.233.298	4,41	45	1	0	0,995
23	Kab. Bolaang Mongondow	1.559.073.801.073	7,49	30	3	0	0,781
24	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.091.126.480.125	6,60	20	3	0	0,889

25	Kab. Bolaang Mongondow Timur	975.189.917.205	5,08	20	3	0	0,822
26	Kab. Bone	2.723.097.337.109	8,91	45	5	0	0,815
27	Kab. Boyolali	3.116.090.963.844	5,72	45	3	0	0,834
28	Kab. Brebes	3.366.883.430.103	5,22	50	3	1	0,799
29	Kota Bukittinggi	1.445.331.498.036	6,02	25	3	0	1,012
30	Kab. Buton	1.684.075.827.376	5,05	25	4	0	0,876
31	Kab. Ciamis	3.062.199.637.596	5,44	50	4	0	0,853
32	Kab. Cilacap	4.590.474.285.434	3,05	50	1	0	0,972
33	Kota Cilegon	4.520.506.103.109	5,97	35	4	0	0,975
34	Kab. Demak	5.084.647.496.851	5,40	50	2	0	0,794
35	Kota Denpasar	6.041.824.168.229	6,43	45	4	1	0,896
36	Kab. Dompu	1.612.827.960.878	4,48	30	3	0	0,903
37	Kota Dumai	2.785.056.552.199	5,35	30	4	0	0,906
38	Kab. Flores Timur	1.329.965.041.696	4,75	30	3	0	0,807
39	Kab. Gianyar	2.270.437.023.012	6,03	40	4	0	0,892
40	Kab. Gorontalo	1.621.056.255.185	6,22	35	5	0	0,996
41	Kota Gorontalo	1.515.453.879.591	7,01	25	4	1	0,978
42	Kab. Gowa	3.759.988.175.398	7,14	45	4	0	0,906
43	Kab. Gunungkidul	2.846.345.700.156	5,16	45	3	0	0,833
44	Kota Gunungsitoli	1.646.901.039.596	6,03	25	4	0	0,836
45	Kota Jambi	3.480.765.299.458	5,26	45	5	1	0,971
46	Kota Jayapura	2.600.645.445.464	5,45	40	5	0	0,899
47	Kab. Jepara	6.132.256.105.265	5,85	50	3	1	0,866
48	Kab. Kampar	4.085.230.964.652	1,92	45	4	0	0,932
49	Kab. Karanganyar	3.190.931.038.152	5,98	45	4	1	0,825
50	Kab. Kebumen	4.548.688.282.913	5,52	50	3	1	0,813
51	Kab. Kediri	4.454.578.539.081	5,08	50	3	0	0,797
52	Kota Kendari	4.781.862.688.024	6,26	35	4	1	0,990
53	Kab. Kepulauan Anambas	1.659.742.334.883	3,28	20	3	0	0,992

54	Kab. Ketapang	4.557.522.832.459	7,99	45	3	0	0,817
55	Kab. Klungkung	1.065.370.734.810	5,50	30	4	0	0,938
56	Kota Kotamobagu	1.199.308.886.513	6,67	25	3	0	0,918
57	Kab. Kotawaringin Barat	2.683.716.937.471	6,46	30	4	0	0,889
58	Kab. Kudus	4.159.213.413.942	3,24	45	4	0	0,861
59	Kab. Kutai Timur	9.368.559.850.533	2,34	40	4	0	0,903
60	Kab. Labuhanbatu Utara	2.282.439.427.132	5,20	35	3	1	0,825
61	Kab. Lampung Barat	2.174.055.841.417	5,14	35	3	0	0,836
62	Kab. Lampung Selatan	3.351.413.355.425	5,26	50	1	0	0,950
63	Kab. Lebak	4.140.801.892.178	5,80	50	4	1	0,832
64	Kab. Lebong	1.561.519.231.664	5,01	25	5	1	0,844
65	Kota Lhokseumawe	1.537.493.771.795	3,84	25	1	0	1,033
66	Kab. Lumajang	2.385.355.101.451	5,02	50	4	0	0,837
67	Kab. Luwu	2.155.041.394.120	6,86	35	4	0	0,826
68	Kota Magelang	3.865.401.096.564	5,46	25	4	0	1,031
69	Kab. Majalengka	4.735.025.847.196	6,10	50	4	1	0,834
70	Kab. Majene	1.573.731.740.996	6,06	25	5	0	0,880
71	Kab. Malaka	1.115.998.026.173	5,11	25	4	0	1,025
72	Kota Malang	6.396.564.384.412	5,72	45	3	0	0,944
73	Kab. Maluku Tengah	2.122.949.857.212	5,94	40	3	0	0,823
74	Kab. Mamuju	2.100.248.519.377	6,03	35	4	0	0,914
75	Kota Mataram	3.111.647.452.541	4,98	40	1	0	1,011
76	Kota Metro	2.808.143.461.945	5,69	25	3	1	1,020
77	Kab. Minahasa	1.865.526.845.341	6,12	35	4	0	0,824
78	Kab. Morowali Utara	1.438.986.692.249	8,89	25	4	0	0,987
79	Kab. Muaro Jambi	2.253.551.124.880	5,12	35	3	1	0,790
80	Kab. Muna	2.319.994.833.451	5,16	30	3	0	0,834
81	Kab. Musi Banyuasin	8.353.874.228.228	3,32	45	5	1	0,851
82	Kab. Nabire	2.110.134.324.674	5,83	25	3	0	0,869
83	Kab. Ngawi	3.718.967.459.827	5,21	45	3	0	0,975

84	Kab. Nunukan	4.904.251.228.195	6,33	25	4	1	0,822
85	Kota Padang	7.125.104.872.207	6,23	45	3	0	1,006
86	Kota Palangkaraya	2.914.358.747.772	7,12	30	3	1	0,937
87	Kota Palembang	14.360.384.701.026	6,69	50	3	0	1,000
88	Kota Palopo	2.109.553.912.300	7,52	25	4	0	1,019
89	Kota Palu	2.513.495.500.695	5,06	35	4	0	0,905
90	Kab. Pamekasan	3.483.606.764.607	5,46	45	3	0	0,792
91	Kota Parepare	2.004.213.755.320	5,58	25	4	0	0,949
92	Kab. Parigi Moutong	2.200.485.981.339	4,62	40	1	0	0,805
93	Kab. Pasaman	1.866.283.283.056	5,00	35	4	0	0,892
94	Kab. Pekalongan	2.763.481.985.690	5,76	45	4	0	0,866
95	Kota Pekalongan	2.463.049.418.792	5,69	30	3	1	0,976
96	Kota Pekanbaru	7.398.075.505.045	5,40	45	5	0	0,993
97	Kab. Pohuwato	1.229.496.440.176	6,48	25	4	1	0,838
98	Kab. Ponorogo	2.840.526.918.332	5,31	45	3	0	0,782
99	Kota Pontianak	7.402.797.838.380	4,91	45	4	0	0,964
100	Kab. Pringsewu	2.063.358.231.315	5,03	40	1	0	0,855
101	Kota Probolinggo	1.681.778.008.505	5,94	30	4	0	0,959
102	Kab. Purbalingga	2.621.915.743.198	5,42	45	4	1	0,819
103	Kab. Purwakarta	2.755.764.325.350	4,98	45	3	1	0,800
104	Kab. Purworejo	2.772.960.299.931	5,38	45	4	1	0,820
105	Kab. Rembang	2.083.375.254.651	5,89	45	3	0	0,820
106	Kota Sabang	1.311.128.243.281	5,86	20	3	0	0,912
107	Kab. Samosir	1.568.385.044.362	5,58	25	4	1	0,827
108	Kab. Semarang	4.381.254.462.290	5,79	45	4	0	0,888
109	Kab. Sidoarjo	17.377.441.188.340	6,02	50	4	0	0,849
110	Kab. Simeulue	1.641.871.162.688	4,35	20	4	0	0,841
111	Kab. Sinjai	1.971.673.341.652	7,44	30	4	0	0,890
112	Kab. Situbondo	3.520.994.088.931	5,47	45	3	0	0,864
113	Kab. Sleman	4.537.884.982.107	6,42	50	4	0	0,847

114	Kab. Soppeng	2.154.372.094.288	8,11	30	3	1	0,900
115	Kab. Sukabumi	4.237.919.081.039	5,79	50	4	1	0,876
116	Kab. Sukoharjo	4.738.164.776.816	5,79	45	4	0	0,847
117	Kab. Sumba Timur	2.058.984.668.505	5,22	30	4	0	0,900
118	Kab. Sumbawa Barat	2.342.326.095.191	3,84	25	5	0	1,002
119	Kota Surakarta	7.733.569.021.424	5,75	45	1	0	1,018
120	Kab. Tabanan	2.192.984.253.069	5,73	40	3	0	0,895
121	Kab. Tana Tidung	3.138.632.835.625	3,88	20	5	0	0,844
122	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.796.985.925.236	6,80	35	5	0	0,849
123	Kota Tanjungpinang	1.580.666.189.075	3,21	30	3	0	0,907
124	Kota Tarakan	5.930.018.044.500	7,55	25	4	0	0,994
125	Kab. Tasikmalaya	4.863.200.296.463	5,93	50	3	1	0,814
126	Kab. Tegal	3.184.190.479.588	5,51	50	3	0	0,843
127	Kota Tegal	2.402.980.382.890	5,87	30	4	0	0,928
128	Kota Ternate	2.334.038.469.427	8,24	30	5	0	0,995
129	Kab. Tuban	6.831.283.504.584	5,17	50	1	0	0,984
130	Kab. Wonogiri	3.441.897.165.791	5,41	45	1	0	0,833

LAMPIRAN 3

Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan dengan Rasio Efisiensi

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
1	Kota Ambon	1.085.584.649.367	1.136.376.523.203	0,955
2	Kota Balikpapan	2.119.971.369.743	2.230.736.621.233	0,950
3	Kota Banda Aceh	1.046.500.852.724	1.135.914.599.521	0,921
4	Kota Bandar Lampung	2.189.034.553.408	2.162.096.665.248	1,012
5	Kab. Bandung	4.560.097.691.605	5.259.974.811.369	0,867
6	Kab. Bangka	950.082.902.642	1.094.530.542.128	0,868
7	Kab. Bangka Selatan	795.971.414.899	865.625.218.279	0,920
8	Kab. Bangli	902.456.204.496	1.106.097.725.500	0,816
9	Kab. Banjar	1.680.314.032.846	1.754.215.067.740	0,958
10	Kota Banjarmasin	1.420.434.003.686	1.558.659.553.620	0,911
11	Kab. Banjarnegara	2.119.096.683.202	2.074.653.116.289	1,021
12	Kab. Bantaeng	836.903.845.676	932.025.701.060	0,898
13	Kab. Bantul	1.903.252.196.995	2.227.505.821.341	0,854
14	Kab. Banyumas	2.741.141.898.312	3.265.926.651.860	0,839
15	Kab. Batanghari	974.990.130.476	1.199.729.789.613	0,813
16	Kab. Belitung	834.405.453.544	963.227.529.030	0,866
17	Kota Bengkulu	1.034812.007.513	1.096.906.666.865	0,943
18	Kab. Bengkulu Utara	938.866.596.944	1.147.687.574.495	0,818
19	Kab. Bima	1.564.810.632.983	1.743.235.708.137	0,898
20	Kab. Bintan	1.088.638.083.809	1.128.432.282.210	0,965
21	Kab. Blitar	2.209.343.992.301	2.352.130.150.237	0,939
22	Kab. Blora	2.110.687.561.459	2.120.671.434.967	0,995
23	Kab. Bolaang Mongondow	803.577.631.019	1.028.718.824.637	0,781
24	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	525.633.954.526	591.049.611.191	0,889
25	Kab. Bolaang Mongondow Timur	497.165.072.353	604.744.400.243	0,822

26	Kab. Bone	1.833.851.263.822	2.251.443.046.555	0,815
27	Kab. Boyolali	1.858.995.686.258	2.227.780.710.062	0,834
28	Kab. Brebes	2.281.596.326.765	2.854.043.939.110	0,799
29	Kota Bukittinggi	703.783.285.315	695.592.067.770	1,012
30	Kab. Buton	691.200.600.944	789.282.625.480	0,876
31	Kab. Ciamis	2.195.985.181.564	2.573.609.421.909	0,853
32	Kab. Cilacap	2.985.422.839.102	3.072.112.464.787	0,972
33	Kota Cilegon	1.589.173.587.634	1.630.020.024.950	0,975
34	Kab. Demak	1.702.389.136.934	2.143.306.258.595	0,794
35	Kota Denpasar	1.900.199.898.487	2.121.040.458.231	0,896
36	Kab. Dompu	960.024.869.667	1.062.785.010.844	0,903
37	Kota Dumai	1.110.153.784.810	1.225.296.406.097	0,906
38	Kab. Flores Timur	878.665.609.365	1.088.688.905.298	0,807
39	Kab. Gianyar	1.785.991.256.903	2.002.646.874.600	0,892
40	Kab. Gorontalo	1.451.790.060.201	1.457.052.397.138	0,996
41	Kota Gorontalo	919.795.576.165	940.489.013.291	0,978
42	Kab. Gowa	1.614.066.430.595	1.781.396.471.000	0,906
43	Kab. Gunungkidul	1.541.394.669.705	1.850.894.408.120	0,833
44	Kota Gunungsitoli	587.506.453.236	702.840.277.058	0,836
45	Kota Jambi	1.577.311.832.700	1.624.877.312.712	0,971
46	Kota Jayapura	1.136.467.522.885	1.264.260.331.071	0,899
47	Kab. Jepara	1.953.640.728.788	2.255.843.022.157	0,866
48	Kab. Kampar	2.168.293.382.294	2.327.551.167.364	0,932
49	Kab. Karanganyar	1.743.713.707.303	2.113.929.231.663	0,825
50	Kab. Kebumen	2.145.847.613.126	2.639.814.864.397	0,813
51	Kab. Kediri	2.286.920.695.424	2.867.950.508.392	0,797
52	Kota Kendari	1.220.315.637.553	1.232.806.862.310	0,990
53	Kab. Kepulauan Anambas	831.402.394.223	837.725.038.534	0,992
54	Kab. Ketapang	1.771.438.378.261	2.168.545.571.101	0,817
55	Kab. Klungkung	1.032.255.732.830	1.100.138.936.499	0,938

56	Kota Kotamobagu	658.703.437.388	717.751.628.327	0,918
57	Kab. Kotawarungin Barat	1.148.404.772.109	1.291.455.997.165	0,889
58	Kab. Kudus	1.719.107.548.945	1.996.530.094.357	0,861
59	Kab. Kutai Timur	2.853.990.613.877	3.159.094.050.724	0,903
60	Kab. Labuhanbatu Utara	852.316.705.281	1.033.343.832.203	0,825
61	Kab. Lampung Barat	940.346.657.367	1.124.189.349.605	0,836
62	Kab. Lampung Selatan	1.974.307.248.247	2.077.292.908.144	0,950
63	Kab. Lebak	2.082.641.686.368	2.504.432.439.567	0,832
64	Kab. Lebong	561.544.901.399	665.221.679.754	0,844
65	Kota Lhokseumawe	774.506.868.913	749.405.667.506	1,033
66	Kab. Lumajang	1.738.195.060.910	2.077.396.056.404	0,837
67	Kab. Luwu	1.092.560.683.991	1.323.121.884.246	0,826
68	Kota Magelang	936.685.044.170	908.089.485.909	1,031
69	Kab. Majalengka	2.348.949.552.739	2.817.970.771.089	0,834
70	Kab. Majene	768.249.305.905	872.674.394.613	0,880
71	Kab. Malaka	772.784.467.689	753.814.119.597	1,025
72	Kota Malang	1.925.070.651.868	2.040.194.240.906	0,944
73	Kab. Maluku Tengah	1.335.093.157.885	1.622.330.833.343	0,823
74	Kab. Mamuju	996.720.131.870	1.090.319.370.020	0,914
75	Kota Mataram	1.434.640.291.212	1.418.432.870.483	1,011
76	Kota Metro	868.248.180.371	850.862.998.519	1,020
77	Kab. Minahasa	1.044.611.620.512	1.267.974.996.960	0,824
78	Kab. Morowali Utara	976.200.971.037	989.137.928.956	0,987
79	Kab. Muaro Jambi	1.041.823.693.395	1.319.276.321.829	0,790
80	Kab. Muna	936.882.571.801	1.123.587.435.927	0,834
81	Kab. Musi Banyuasin	2.569.468.000.595	3.019.699.825.935	0,851
82	Kab. Nabire	1.144.640.924.066	1.316.572.373.355	0,869
83	Kab. Ngawi	2.026.237.765.090	2.078.139.645.055	0,975
84	Kab. Nunukan	978.003.123.157	1.189.894.994.092	0,822
85	Kota Padang	2.173.932.844.481	2.160.375.621.454	1,006

86	Kota Palangkaraya	1.079.995.561.309	1.152.778.640.269	0,937
87	Kota Palembang	3.487.054.548.811	3.485.882.634.349	1,000
88	Kota Palopo	982.922.627.365	964.783.951.705	1,019
89	Kota Palu	1.191.550.500.271	1.316.087.928.104	0,905
90	Kab. Pamekasan	1.458.086.450.650	1.841.101.038.915	0,792
91	Kota Parepare	790.230.343.853	832.930.414.121	0,949
92	Kab. Parigi Moutong	1.200.108.525.902	1.490.820.672.938	0,805
93	Kab. Pasaman	882.012.244.058	988.438.487.804	0,892
94	Kab. Pekalongan	1.819.039.472.364	2.101.449.302.496	0,866
95	Kota Pekalongan	883.184.894.707	905.231.572.568	0,976
96	Kota Pekanbaru	2.220.358.504.219	2,235.018.502.739	0,993
97	Kab. Pohuwato	758.514.064.354	904.691.929.792	0,838
98	Kab. Ponorogo	1.798.636.874.854	2.300.334.167.916	0,782
99	Kota Pontianak	1.604.016.840.875	1.663.204.429.559	0,964
100	Kab. Pringsewu	984.393.893.095	1.150.545.601.855	0,855
101	Kota Probolinggo	947.112.971.040	987.602.131.967	0,959
102	Kab. Purbalingga	1.596.511.126.300	1.948.442.029.100	0,819
103	Kab. Purwakarta	1.648.434.973.535	2.060.667.874.221	0,800
104	Kab. Purworejo	1.680.531.555.419	2.049.784.186.054	0,820
105	Kab. Rembang	1.464.320.909.614	1.785.911.075.230	0,820
106	Kota Sabang	562.517.551.849	617.065.184.869	0,912
107	Kab. Samosir	664.127.057.315	802.686.254.059	0,827
108	Kab. Semarang	1.880.355.549.568	2.117.130.120.670	0,888
109	Kab. Sidoarjo	3.677.417.963.792	4.332.577.984.768	0,849
110	Kab. Simeulue	696.533.809.554	827.761.914.218	0,841
111	Kab. Sinjai	1.012.207.505.196	1.136.907.609.911	0,890
112	Kab. Situbondo	1.517.468.027.508	1.755.587.299.205	0,864
113	Kab. Sleman	2.298.131.055.803	2.712.794.080.456	0,847
114	Kab. Soppeng	1.040.839.715.420	1.156.095.470.706	0,900
115	Kab. Sukabumi	3.295.457.180.961	3.762.187.754.583	0,876

116	Kab. Sukoharjo	1.740.840.296.519	2.055.517.964.074	0,847
117	Kab. Sumba Timur	954.213.579.856	1.087.356.615.021	0,900
118	Kab. Sumbawa Barat	1.087.478.410.419	1.085.140.803.316	1,002
119	Kota Surakarta	1.913.787.493.276	1.879.056.016.679	1,018
120	Kab. Tabanan	1.667.272.145.950	1.862.277.203.959	0,895
121	Kab. Tana Tidung	527.495.734.676	624.774.868.327	0,844
122	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.174.309.936.034	1.383.043.412.834	0,849
123	Kota Tanjungpinang	835.565.086.617	921.104.842.116	0,907
124	Kota Tarakan	879.879.954.127	885.538.700.521	0,994
125	Kab. Tasikmalaya	2.895.532.164.594	3.557.974.395.890	0,814
126	Kab. Tegal	2.127.372.729.068	2.524.365.919.814	0,843
127	Kota Tegal	916.079.821.600	987.244.236.619	0,928
128	Kota Ternate	898.312.618.176	902.529.838.141	0,995
129	Kab. Tuban	2.415.211.580.094	2.455.664.334.976	0,984
130	Kab. Wonogiri	1.914.884.382.844	2.298.176.600.990	0,833

LAMPIRAN 4

Karakteristik Kepala Daerah

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan					Background Pendidikan	
		SLTA	D	S1	S2	S3	NE	E
		1	2	3	4	5	0	1
1.	Kota Ambon			3			0	
2.	Kota Balikpapan			3				1
3.	Kota Banda Aceh				4			1
4.	Kota Bandar Lampung				4		0	
5.	Kab. Bandung				4		0	
6.	Kab. Bangka				4		0	
7.	Kab. Bangka Selatan				4			1
8.	Kab. Bangli				4		0	
9.	Kab. Banjar	1					0	
10.	Kota Banjarmasin				4		0	
11.	Kab. Banjarnegara	1					0	
12.	Kab. Bantaeng					5	0	
13.	Kab. Bantul			3			0	
14.	Kab. Banyumas			3			0	
15.	Kab. Batanghari			3			0	
16.	Kab. Belitung			3			0	
17.	Kota Bengkulu			3				1
18.	Kab. Bengkulu Utara			3			0	
19.	Kab. Bima			3				1
20.	Kab. Bintan			3			0	
21.	Kab. Blitar				4			1
22.	Kab. Blora	1					0	
23.	Kab. Bolaang Mongondow			3			0	
24.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			3			0	
25.	Kab. Bolaang Mongondow Timur			3			0	
26.	Kab. Bone					5	0	
27.	Kab. Boyolali			3			0	
28.	Kab. Brebes			3				1
29.	Kota Bukittinggi			3			0	
30.	Kab. Buton				4		0	
31.	Kab. Ciamis				4		0	
32.	Kab. Cilacap	1					0	
33.	Kota Cilegon				4	0		
34.	Kab. Demak		2				0	
35.	Kota Denpasar				4			1
36.	Kab. Dompu			3			0	
37.	Kota Dumai				4		0	
38.	Kab. Flores Timur			3			0	
39.	Kab. Gianyar				4		0	
40.	Kab. Gorontalo					5	0	
41.	Kota Gorontalo				4			1
42.	Kab. Gowa				4		0	
43.	Kab. Gunungkidul			3			0	

44.	Kota Gunungsitoli				4		0	
45.	Kota Jambi					5		1
46.	Kota Jayapura					5	0	
47.	Kab. Jepara			3				1
48.	Kab. Kampar				4		0	
49.	Kab. Karanganyar				4			1
50.	Kab. Kebumen			3				1
51.	Kab. Kediri			3			0	
52.	Kota Kendari				4			1
53.	Kab. Kepulauan Anambas			3			0	
54.	Kab. Ketapang			3			0	
55.	Kab. Klungkung				4		0	
56.	Kota Kotamobagu			3			0	
57.	Kab. Kotawaringin Barat				4		0	
58.	Kab. Kudus				4		0	
59.	Kab. Kutai Timur				4		0	
60.	Kab. Labuhanbatu Utara			3				1
61.	Kab. Lampung Barat			3			0	
62.	Kab. Lampung Selatan	1					0	
63.	Kab. Lebak				4			1
64.	Kab. Lebong					5		1
65.	Kota Lhokseumawe	1					0	
66.	Kab. Lumajang				4		0	
67.	Kab. Luwu				4		0	
68.	Kota Magelang				4		0	
69.	Kab. Majalengka				4			1
70.	Kab. Majene					5	0	
71.	Kab. Malaka				4		0	
72.	Kota Malang			3			0	
73.	Kab. Maluku Tengah			3			0	
74.	Kab. Mamuju				4		0	
75.	Kota Mataram	1					0	
76.	Kota Metro			3				1
77.	Kab. Minahasa				4		0	
78.	Kab. Morowali Utara				4		0	
79.	Kab. Muaro Jambi			3				1
80.	Kab. Muna			3			0	
81.	Kab. Musi Banyuasin					5		1
82.	Kab. Nabire			3			0	
83.	Kab. Ngawi			3			0	
84.	Kab. Nunukan				4			1
85.	Kota Padang			3			0	
86.	Kota Palangkaraya			3				1
87.	Kota Palembang			3			0	
88.	Kota Palopo				4		0	
89.	Kota Palu				4		0	
90.	Kab. Pamekasan			3			0	
91.	Kota Parepare				4		0	
92.	Kab. Parigi Moutong	1					0	
93.	Kab. Pasaman				4		0	
94.	Kab. Pekalongan				4		0	
95.	Kota Pekalongan			3				1
96.	Kota Pekanbaru					5	0	

97.	Kab. Pohuwato				4			1
98.	Kab. Ponorogo			3			0	
99.	Kota Pontianak				4		0	
100.	Kab. Pringsewu	1					0	
101.	Kota Probolinggo				4		0	
102.	Kab. Purbalingga				4			1
103.	Kab. Purwakarta			3				1
104.	Kab. Purworejo				4			1
105.	Kab. Rembang			3			0	
106.	Kota Sabang			3			0	
107.	Kab. Samosir				4			1
108.	Kab. Semarang				4		0	
109.	Kab. Sidoarjo				4		0	
110.	Kab. Simeulue				4		0	
111.	Kab. Sinjai				4		0	
112.	Kab. Situbondo			3			0	
113.	Kab. Sleman				4		0	
114.	Kab. Soppeng			3				1
115.	Kab. Sukabumi				4			1
116.	Kab. Sukoharjo				4		0	
117.	Kab. Sumba Timur				4		0	
118.	Kab. Sumbawa Barat					5	0	
119.	Kota Surakarta	1					0	
120.	Kab. Tabanan			3			0	
121.	Kab. Tana Tidung					5	0	
122.	Kab. Tanjung Jabung Barat					5	0	
123.	Kota Tanjungpinang			3			0	
124.	Kota Tarakan				4		0	
125.	Kab. Tasikmalaya			3				1
126.	Kab. Tegal			3			0	
127.	Kota Tegal				4		0	
128.	Kota Ternate					5	0	
129.	Kab. Tuban	1					0	
130.	Kab. Wonogiri	1					0	

LAMPIRAN 5

Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah	130	975190	17377400	3460804	2504515
Pertumbuhan Ekonomi	130	1.92	8.91	5.59	1.1385
Ukuran Legislatif	130	20	50	37.26	9.727121
Kinerja Keuangan	130	.781	1.033	.89518	.070329
Valid n	130				

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SLTA	12	9.2	9.2	9.2
Diploma	1	.8	.8	10.0
S1	49	37.7	37.7	47.7
S2	55	42.3	42.3	90.0
S3	13	10.0	10.0	100.0
Total	130	100.0	100.0	

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Non-Ekonomi	98	75.4	75.4	75.4
Ekonomi	32	24.6	24.6	100.0
Total	130	100.0	100.0	

LAMPIRAN 6

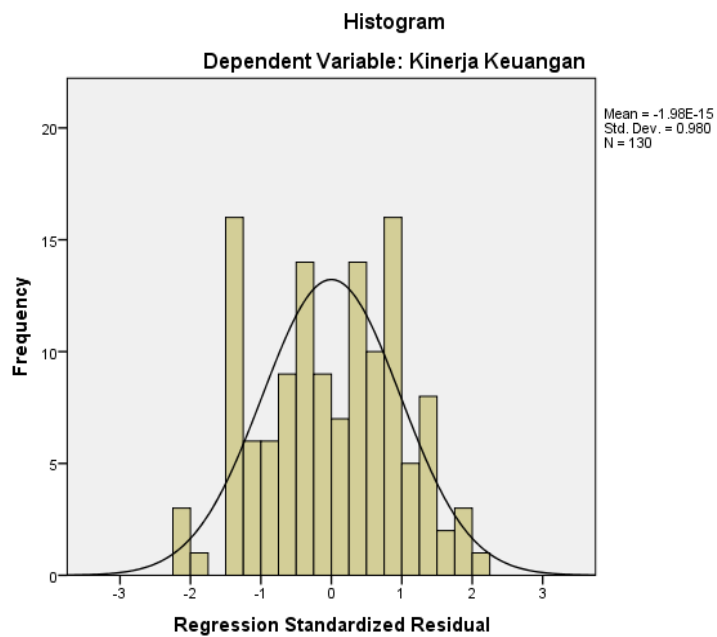
Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

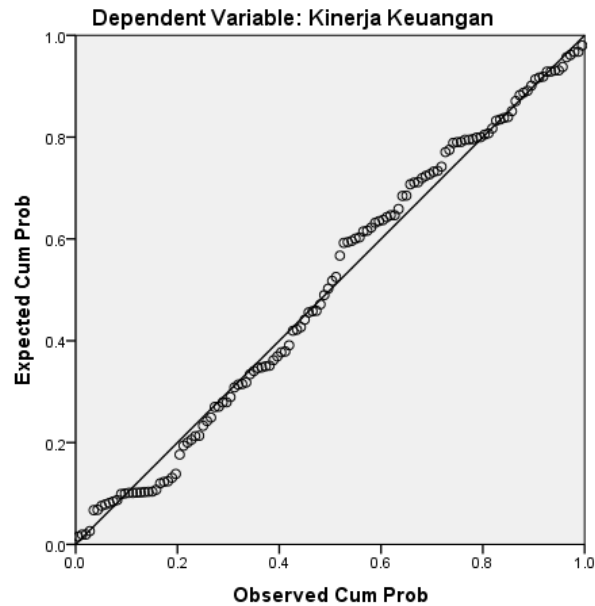
		Unstandardized Residual
n		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06997468
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.066
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.810
Asymp. Sig. (2-tailed)		.528

Histogram Uji Normalitas



P-P Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



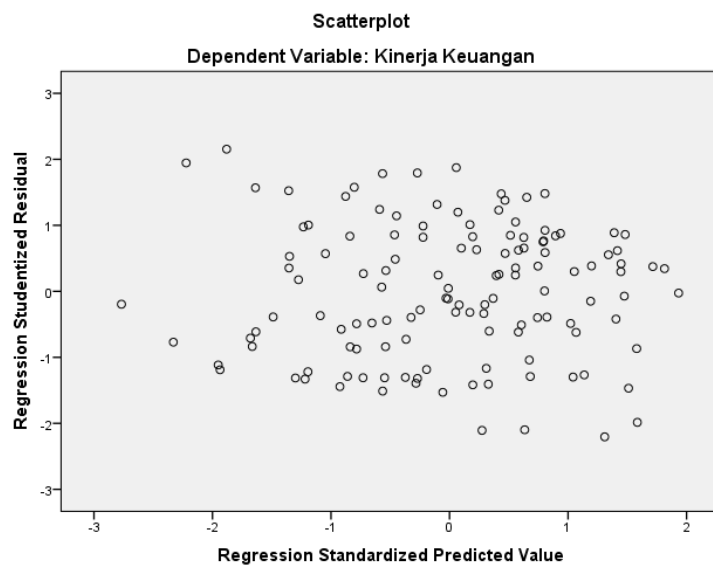
b. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.286	.367		3.507	.001		
Ukuran Pemerintah	.061	.015	.447	4.102	.000	.549	1.823
Pertumbuhan Ekonomi	.006	.028	.016	.197	.844	.962	1.039
Ukuran Legislatif	.148	.031	.533	4.786	.000	.525	1.907
Tingkat Pendidikan	.042	.016	.220	2.560	.012	.880	1.136
Background Pendidikan	.018	.015	.099	1.195	.234	.957	1.045

c. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.058	.191		.306	.760
Ukuran Pemerintah	-.003	.008	-.054	-.451	.653
Pertumbuhan Ekonomi	-.006	.015	-.039	-.437	.663
Ukuran Legislatif	-.026	.016	-.194	-1.600	.112
Tingkat Pendidikan	-.015	.008	-.170	-1.814	.072
Background Pendidikan	.000	.008	-.002	-.023	.982

Uji Heteroskedastisitas *Scatterplot*



LAMPIRAN 7

Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.286	.367		3.507	.001
Ukuran Pemerintah	.061	.015	.447	4.102	.000
Pertumbuhan Ekonomi	.006	.028	.016	.197	.844
Ukuran Legislatif	.148	.031	.533	4.786	.000
Tingkat Pendidikan	.042	.016	.220	2.560	.012
Background Pendidikan	.018	.015	.099	1.195	.234

b. Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 ^a	.192	.160	.071372

c. Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.286	.367		3.507	.001
Ukuran Pemerintah	.061	.015	.447	4.102	.000
Pertumbuhan Ekonomi	.006	.028	.016	.197	.844
Ukuran Legislatif	.148	.031	.533	4.786	.000
Tingkat Pendidikan	.042	.016	.220	2.560	.012
Background Pendidikan	.018	.015	.099	1.195	.234

